

Vol. II No. 3 Juli - September 2022

ISSN : 2775 - 2380

JURNAL FADILLAH

MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM & UMUM



PRODI (S1) MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

Jl. Williem Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683 Fax. 061-6615683 Medan Estate 20371

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA MADRASAH
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
DI MAS AL-WASHLIYAH 22 TEMBUNG**

Andre Muktar Nasution
(0307181007)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan
AndreMuktarNasution00@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kebijakan kepala sekolah, mengetahui mutu pendidikan, mengetahui kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di MAS Al-Washliyah 22 Tembung pada Jum'at 4 Maret 2022 Subjek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, dan guru. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi, uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*). Dan dapat dilakukan dengan uji dependilitas (*dependility*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Implementasi kebijakan mutu pendidikan di MAS Al-Washliyah 22 Tembung dengan membuat suatu perencanaan /perumusan program kemudian berkerjasama dengan seluruh stekholder yang ada di sekolah tersebut menjalankan (implementasi program) dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap program yang di buat sesuai dengan tujuan melalui hasil musyawarah(rapat) yang mana program tersebut adalah adanya visi dan misi, Tahfizul Al-Qur'an, Ekstrakurikuler serta yang lainnya. Mutu pendidikan nya adalah dengan menggunakan 8 Standar Nasional Pendidikan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah yaitu Standar isi, Standar kompetensi, Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan, Standar lulusan, Standar pembiayaan dan standar Pengolaan, kebijakannya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan membuat Program Tahfizh Quran dan Ekstrakurikuler.

Kata kunci: *Kebijakan Kepala Madrasah dan Mutu Pendidikan.*

ABSTRACT

This study aims to determine the principal's policy process, to know the quality of education, to know the principal's policy to improve the quality of education. This research is a qualitative descriptive study. This research was conducted at MAS Al-Washliyah 22 Tembung on Friday, March 4, 2022. The research subjects were the principal, vice principal, administration, and teachers. Data was collected by observation, interviews, and documentation. Data analysis data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The validity of the data was tested by triangulation, credibility test, transferability test. And can be done with a dependency test (dependility).

The results showed that the process of implementing the education quality policy at MAS Al-Washliyah 22 Tembung by making a plan / program then collaborating with all stakeholders in the school carried out (implementation programs) and the last one was evaluating the program that was made according to with the aim that through the results of the deliberation where the program is the existence of a vision and mission, Tahfizul Al-Qur'an, extracurricular and others. The quality of education is to use 8 National Education Standards in accordance with Government Regulations, namely Content Standards, Competency Standards, Educators and Education Personnel Standards, Graduate Standards, Financing Standards, and Management Standards, the principal's policy in improving the quality of education is to make the Tahfizh Quran Program and Extracurricular.

Keywords: *Principal's Policy and Education Quality.*

A. PENDAHULUAN

Kebijakan manajemen madrasah secara internal merupakan ketetapan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama masalah pendanaan. Hal ini disebabkan kebutuhan akan biaya produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan suatu madrasah.¹ Manajemen madrasah sendiri dilaksanakan dengan bantuan beberapa sumber, antara lain yakni sumber material, sumber informasi, sumber biaya, sumber manusia.

Manajemen dalam implementasinya memperhatikan keadaan tertentu agar berjalan efisien dan efektif. Hal ini ditinjau dari aspek tenaga, dana dan waktu. Strategi dalam manajemen menuntut akan keahlian dan kekhususan dalam menanganinya, terlebih saat ini merupakan era peningkatan sumber daya manusia.⁴ Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas dari suatu

lembaga pendidikan dibutuhkan sumber daya manusia yang harus memiliki kemampuan baik serta relevan dengan kebutuhan perencanaan pendidikan.

Kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan harus dapat mengenal dan mengerti berbagai kedudukan, keadaan dan apa yang diinginkan baik oleh guru maupun pegawai tata usaha serta pembantu lainnya (Hou et al., 2018). Sehingga dengan adanya kerjasama yang baik dapat menghasilkan pikiran yang harmonis dalam usaha perbaikan madrasah (Sadler, 2017). Kepala madrasah merupakan motor penggerak penentu arah kebijakan madrasah, yang akan menentukan bagaimana tujuan madrasah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan (Beerkens, 2018; Davis, 2017). Kepala madrasah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas kerja sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan (Hidayat & Machali, 2018; Manap, 2013). Mutu pendidikan bukanlah suatu yang berdiri sendiri tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan terkait sebagai suatu proses dalam sebuah sistem, bila membicarakan masalah mutu pendidikan maka tidak akan terlepas dari tiga unsur pendidikan yaitu, input, proses, dan lulusan (Amin, Arsil, Fathurrochman, Bahri, & Rahmaningsih, 2019; Pretorius & Macaulay, 2019; Ristianti, Danim, Winarto, & Dharmayana, 2019).

Dalam Undang-Undang 1945 pasal 31 : Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Landasan konstitusional komitmen pendidikan inilah yang membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia untuk berbuat baik bagi sistem pendidikan nasional melalui berbagai kebijakan bidang pemerintahan dan pembangunan, termasuk kebijakan otonomi daerah. Kepala madrasah harus mampu melahirkan gagasan inovatif yang berguna untuk menghasilkan alternatif kebijakan dalam membangun (Hidayat & Machali, 2018). Sistem pendidikan yang efisien, bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan (Salto, 2018).

Kebijakan kepala madrasah pasti sangat berpengaruh terhadap bagaimana sekolah akan terus berlanjut, kebijakan yang bagus, teliti serta tetap mempertimbangkan banyak aspek nantinya akan membuahkan suatu hal yang baik bagi keberlangsungan pendidikan di madrasah tersebut, baik itu dari sisipendidik dan peserta didik. Sehingga diharapkan *output* yang dihasilkan akan berkualitas.

MAS Al-Washliyah 22 Tembung bagi masyarakat adalah untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dengan harapan menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya dari segi akademis maupun non akademis. Sebagai pendidikan formal MAS Al-Washliyah 22 Tembung potensi untuk berkembang sebagai lembaga pendidikan yang mampu bersaing dengan lembaga pendidikan

lainnya. Dalam perkembangan mutu pendidikan MAS Al-Washliyah 22 Tembung patut dibanggakan, karena merupakan salah satu madrasah yang ingin menjadi madrasah yang bermutu.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji penelitian mengenai kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2012: 6), penelitian kualitatif adalah Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode.

Adapun alasan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari fakta-fakta berupa tulisan dan kata-kata yang berasal dari sumber- sumber atau informan yang dapat diteliti dan dipercaya.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif (*descriptive research*). pendekatan deskriptif dalam penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsi dan menginterpretasi kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang (Syafi'i, 2005: 21).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Kebijakan Kepala Madrasah dalam di MAS Al-Washliyah 22 Tembung.

Kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani yaitu “polis” yang artinya kota. Analisis kebijakan pendidikan dapat dipahami baik melalui pendekatan metodologis maupun konseptual. Metodologi pada intinya merupakan keseluruhan proses yang secara sistematis dilakukan untuk melembagakan kebijakan dalam suatu sistem dan mekanisme yang institusional (Torabi et al., 2016). Secara konseptual analisis kebijakan merupakan suatu ilmu perekayasa sosial (*social engineering*) yang artinya ialah ilmu yang ditujukan untuk melahirkan manfaat dari konsep dan teori dalam berbagai disiplin ilmu sosial untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh suatu kebijakan publik.

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan publik merupakan bagian dari

keputusan politik, dimana keputusan tersebut menyangkut dan mempengaruhi masyarakat serta di fahami sebagai pilihan terbaik dari berbagai alternatif pilihan mengenai urusan publik yang menjadi kewenangan pemerintah (Kusumawati, 2019).

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkahlangkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Menurut Nurharjatmo, dengan modelnya merumuskan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan adalah; 1) standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, 2) tersedianya sumber daya, baik yang berupa dana, tehnologi, sarana maupun prasarana lainnya, 3) komunikasi antara organisasi yang baik ,4) karakteristik birokrasi pelaksana, 5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Amin et al., 2019).

Ada beberapa aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan, diantaranya adalah: 1. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari kesatuan teori dan praktik 2. Kebijakan pendidikan mempunyai validitas perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu 3. Kebijakan pendidikan ditujukan pada kebutuhan peserta didik 4. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran visi, misi dan tujuan pendidikan 5. Kebijakan pendidikan memiliki kejelasan tujuan untuk melahirkan pendidikan yang tepat (Irmayani, Wardiah, & Kristiawan., 2018).

Kebijakan pendidikan adalah suatu bentuk tindakan yang diambil atas beberapa pertimbangan, untuk mengarahkan manajer/kepala madrasah dalam menentukan masa depan madrasah sesuai dengan visi, misi pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan yang diinginkan (Mardlotillah, 2013).

Dari hasil temuan penelitian di atas, proses kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAS Al-Washliyah 22 Tembung dengan membuat suatu perencanaan /perumusan program kemudian berkerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah tersebut menjalankan (implementasi program) dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap program yang di buat sesuai dengan tujuan melalui hasil musyawarah(rapat) yaitu dengan membuat program Tahfizul Al-Qur'an, program ekstrakurikuler dll.

Sesuai dengan pernyataan Rusdiana, dalam buku Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi menyatakan bahwa Dalam suatu kebijakan pendidikan terdapat tiga tahap kebijakan yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi. kepala sekolah sebagai petugas yang

profesional diuntut untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi dari kebijakan pendidikan yang telah dibuat tersebut.

2. Mutu pendidikan di MAS Al-Washliyah 22 Tembung

Mutu adalah pemenuhan terhadap kebutuhan stakeholde, bersistem pencegahan, mempunyai standar tanpa cacat dan mempunyai ukuran harga ketidakpuasan. Mutu dalam bidang pendidikan meliputi mutu input, output dan outcomes. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses, proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang pendidikan aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Output pendidikan dikatakan bermutu jika hasil belajar akademik maupun non akademik siswa tinggi. Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas (Akinyemi & Abiddin, 2013; Beerkens, 2018).

Menurut (Pfeffer, 2015) ada beberapa kebingungan terhadap pemaknaan mutu bisa muncul karena mutu dapat digunakan sebagai konsep yang secara bersama-sama absolute dan relative. Mutu secara mutlak atau absolut memiliki ukuran nilai tertinggi, bersifat unik dan sangat berkaitan dengan ungkapan kebaikan (goodness), keindahan (beauty), kebenaran (truth) dan idealitas. Biasanya mutu dalam ukuran absolut sudah ditetapkan produsen secara subjektif.

Aplikasi mutu yaitu: pertama redefinisi tugas untuk memudahkan kerja bagi semua unsur pendidikan, maka diperlukan pembagian tugas (job description) yang jelas. Sekaligus sebagai upaya menghindari dari overlapping diantara masing-masing unsur tersebut. Kedua, profesionalisme pimpinan lembaga pendidikan yang paling bertanggung jawab dalam tumbuh kembangnya prakarsa, partisipasi, inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan kelembagaan. Ketiga berorientasi pada proses dan produk untuk meningkatkan hasil belajar salah satu hal penting adalah memperhatikan proses belajar mengajar. Keempat, berorientasi pada perubahan mental. Setiap aktifitas pendidikan, sesuatu yang harus menjadi perhatian utama adalah hasil yang ingin dicapai yaitu tujuan dan target pendidikan dan akhlakul karimah sebagai porsi paling penting dalam pendidikan Islam (Noor & Sikand, 2008).

Total Quality Management dalam pendidikan adalah filosofi perbaikan terus menerus dimana lembaga pendidikan menyediakan seperangkat sarana atau alat untuk memenuhi bahkan melampaui kebutuhan, keinginan dan harapan stakeholder saat ini dan dimasa mendatang (Jabbar & Hussin, 2019). Dalam dunia pendidikan madrasah yang bermutu adalah madrasah yang menetapkan keberhasilan pada proses, out put, dan out come. Jika mutu pendidikan ingin dicapai maka siswa, guru, staf dan masyarakat harus bekerjasama untuk mewujudkan tujuan

(Noor & Sikand, 2008). Dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka kita harus memperhatikan mengenai beberapa, Komponen-komponen: a) Siswa dan Guru b) Kurikulum c) Sarana dan prasarana pendidikan d) Pengelolaan madrasah, meliputi pengelolaan kelas, guru, siswa, sarana dan prasarana, peningkatan tata tertib dan kepemimpinan e) Pengelolaan proses pendidikan, meliputi penampilan guru, penguasaan materi, serta penggunaan strategi pendidikan f) Pengelolaan dana g) Evaluasi h) Kemitraan, meliputi hubungan madrasah dengan lembaga lain.

Peningkatan mutu madrasah menurut Sudarwan Danim (2013) melibatkan lima faktor: 1. Kepemimpinan Kepala madrasah yang efektif 2. Siswa, “anak sebagai pusat “sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali 3. Pelibatan guru secara maksimal. 4. Kurikulum yang tetap tetapi dinamis, sehingga tujuan mutu dapat dicapai 5. Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan madrasah dan masyarakat tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan/instansi 6. Pimpinan dan karyawan harus menjadi satu tim yang utuh (team-work) yang saling membutuhkan dan saling mengisi kekurangan yang ada sehingga target (goals) akan tercipta dengan baik. Untuk peningkatan aktivitas dan kreatifitas peserta didik, peningkatan disiplin belajar, kepala sekolah harus menerapkan beberapa langkah berikut ini : 1) Peningkatan aktivitas dan kreatifitas peserta didik, proses pendidikan pada hakekatnya untuk mengembangkan aktifitas dan kreatifitas peserta didik melalui berbagai interaksi peserta didik; 2) Peningkatan disiplin belajar, disiplin madrasah dapat diartikan sebagai keadaan tertib dimana guru, staf madrasah dan peserta didik bergabung dalam madrasah, tunduk kepada peraturan yang telah ditetapkan dengan senang hati; 3) Peningkatan motivasi belajar, mulyasa (2005) menyebutkan bahwa peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi. Dalam kaitannya dengan ini guru dituntut untuk memiliki kemampuan untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan belajar.

Madrasah MAS Al-Washliyah 22 Tembung telah menerapkan (8 SNP) delapan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah di buat yang mana Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar isi, Standart kompetensi lulusan, Standar pendidik, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, dan Standar penilaian yang merupakan tugas kepala sekolah dan seluruh stekholder untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut walau sarana dan prasarana pendidikan di MAS Al-Washliyah 22 Tembung masih kurang yaitu tidak adanya perpustakaan sekolah, ruang diskusi dan mushollah serta yang lainnya tidak membuat para sisiwa merasa tidak nyaman sehingga pembelajaran berjalan dengan baik serta guru yang kurang profesional dalam mengajar maka

kepala sekolah selalu membimbing dan memotivasi mereka dengan lebih baik dan membuat suatu kebijakan atau program di sekolah berupa program Tahfizul Al- Quar'an, program Eksrakurikuler dll.

Sesuai dengan pernyataan PP No.19 Tahun 2005 di sebutkan bahwa pendidikan di indonesia menggunakan delapan standar pendidikan yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar nasional bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangkai mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (PP 19/2005 Pasal 4). Oleh karena itu kualitas dan penjaminan kualitas dapat di pandang sebagai suatu inovasi dalam suatu pendidikan.

3. Implementasi Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Saleh (2004) menjelaskan bahwa dalam usaha menerapkan peningkatan mutu pendidikan nasional adalah melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen pendidikan. Ada beberapa komponen yang dapat meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya adalah : (a). Proses pendidikan; Pikiran utama yang terdapat dalam prinsip, strategi, dan tahapan belajar mengajar mencerminkan bahwa pendidikan tidak sesederhana dengan proses penyampaiannya. (b). Prosedur pendidikan. Pengembangan kegiatan belajar mengajar harus diorientasikan pada fitrah manusia agar terwujud keseimbangan.

Pendekatan pendidikan, yang dapat ditempuh oleh Kepala Sekolah antara lain adalah ; 1) Pendekatan rasional, pendekatan pendidikan yang lebih menekankan pada aspek penalaran; 2) Pendekatan emosional, yakni upaya menggugah perasaan (emosi) peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa; 3) Pendekatan pengalaman, yakni memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktekkan dan merasakan hasil-hasil pengalaman ibadah dalam menghadapi tugas-tugas dan masalah-masalah dalam kehidupan; 4) Metode, Metode apapun yang digunakan oleh pendidik dalam proses pendidikan harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan; 5) Kurikulum Pengembangan kurikulum harus dapat mengakomodasikan unsur-unsur teoritis dan praktis berdasarkan tujuan yang berdasarkan kebutuhan yang diperkirakan sesuai dengan dinamika yang beraneka ragam; 6) Kerja pendidikan, Kerja pendidikan ini bagi pendidik dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap mutu pendidikan secara team teaching di kelas dan team working dalam workshop; 7) Peran pendidik Tiga komponen kompetensi yang harus dimiliki guru agar kegiatan pendidikan yang dilakukan bisa berjalan dengan efektif : (a). Komponen kompetensi pengelolaan pendidikan yang meliputi: penyusunan rencana pendidikan, pelaksanaan interaksi

belajar mengajar, penilaian prestasi belajar peserta didik, pelaksanaan tindak lanjut peserta didik. (b). Komponen kompetensi pengembangan potensi yaitu pengembangan profesi. (c). Komponen kompetensi penguasaan akademik yang meliputi: pemahaman wawasan pendidikan, dan penguasaan bahan kajian; 8) Pengelolaan siswa/pendekatan “anak sebagai pusat” (the child-centered approach). Filosofi pendidikan berpusat pada siswa adalah penekanan lebih pada proses pendidikan secara signifikan ketimbang produk/outcomes pendidikan. Pada pendekatan ini lebih menitik beratkan pada: (a). Anak adalah sentral pelaksanaan pendidikan; (b). Pendidikan berfokus pada anak secara total; (c). Guru memberi peluang bagi anak untuk secara alami mengembangkan diri hingga ke tingkat edvan; (d). Sentral perubahan terhadap anak meski tidak selalu diobservasi; (e). Perubahan hanya dialami pada konteks dari siswa secara menyeluruh; (f). Perubahan dan motivasi anak bersifat internal, guru hanya member dorongan dan fasilitas (Sudarwan Danim, 2006); 9) Pengelolaan lingkungan kelas, Iklim belajar yang kondusif merupakan faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik terhadap proses pendidikan, sebaliknya iklim belajar yang kurang menyenangkan akan menimbulkan kejenuhan dan rasa bosan.

Implementasi Kebijakan atau program pendidikan di MAS Al-Washliyah 22 Tembung adalah membuat program Tahfizul Al-Quar’an, program Eksrakurikuler guna meningkatkan mutu pendidikan dengan adanya Komunikasi dilakukan baik secara formal maupun informal. Yaitu Rapat secara formal dilakukan dengan Rapat Kerja, *Briefing*, Rapat Pimpinan serta rapat antara kepala seklah dan guru- guru dan seluruh stakeholder yang ada di sekolahter tersebut.

Sesuai dengan pernyataan, Sabatier dan Mazmanian dalam Sudiyono, mengemukakan bahwa putusan kebijakan dapat dilaksanakan dengan optimal jika memenuhi berbagai persyaratan implementasi salah satunya adalah perlu adanya koordinasi yang kuat antar berbagai agen atau lembaga implementor. Koordinasi atau komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu pendidikan di sekolah berjalan rutin yaitu dengan adanya komunikasi terbuka antara sesama.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a Proses kebijakan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan melakukan perencanaan atau perumusan kebijakan yang di buat kemudian melakukan pengorganisasi yaitu bekerja sama agar kebijakan yang telah di buat dapat berjalan dan di imlementasikan yaitu menjalankan kebijakan yang di buat serta yang terahhir adalah

melakukan evaluasi yang mana program tersebut adalah visi dan misi sekolah, program Tahfizul Al Qura'an, program Ektrakurikuler agar dapat meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien.

- b. Mutu pendidikan MAS Al-Washliyah 22 Tembung mempunyai telah menerapkan (8 SNP) delapan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah di buat yang mana Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar isi, Standart kompetensi lulusan, Standar pendidik, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, dan Standar penilaian yang merupakan tugas kepala sekolah dan seluruh stekholder untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut walau sarana dan prasarana pendidikan di MAS Al-Washliyah 22 Tembung masih kurang yaitu tidak adanya perpustakaan sekolah, ruang diskusi dan mushollah serta yang lainnya tidak membuat para sisiwa merasa tidak nyaman sehingga pembelajaran berjalan dengan baik serta guru yang kurang profesional dalam mengajar maka kepala sekolah salalu membimbing dan memotivasi meraka dengan lebih baik.
- c. Implementasi Kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAS Al-Washliyah 22 Tembung adalah sebelum kepala sekolah membuat kebijakan atau program kepala sekolah melakukan komunikasi terbuka dalam pengambilan dalam keputusan dilakukan baik secara formal maupun informal Melalui Rapat Kerja, *Briefing*, Rapat Pimpinan, Rapat Wali Kelas, Rapat Guru Senior, Rapat Guru dan Karyawan, Rapat Dinas, Rapat Bidang Studi dalam rangkah meningkatkan mutu pendidikan dengan melihat sumber daya manusia (SDM) siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya keuangan dan sumber daya sarana dan parasana agar dapat mencapai suatu tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Yang mana program tersebut adalah visi dan misi sekolah, program Tahfizul Al-Qur'an, ekstrakurukuler. Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAS Al-Washliyah 22 Tembung menjalankan sesuai dengan visi dan misi yang di buat dan sesuai dengan program yang di jalankan dan kepala sekolah merupakan kepala sekolah yang baik dalam gaya kepemimpinanya yaitu selalu terbuka antara sesama dan demogratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasri, M Nazar, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Imlementasi dalam Pendidikan Islam, Jurnal Kutubkhanah* 19, (02), 2016, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/2547/1612>.

- Assingkily, Muhammad Shaleh, *Living Qur'an as A Model of Islamic Basic Education in the Industrial Era 4.0*, Al-Ibtida', Jurnal Pendidikan Guru MI 6 (1), 2009, <http://dx.doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v6i1.3876>.
- Danarwati, Yanti Sri, *Manajemen Pembelajaran dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jurnal Mimbar Bumi Bengawan 6 (13), 2013, <http://www.stia-asmisolo.ac.id/jurnal/index.php/jmbb/article/view/21/19>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang Guru dan Dosen. Retrieved from <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/uu-nomor-14-tahun-2005-ttg-guru-dan-dosen.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. *Permendikbud no. 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah* pasal 2 ayat 1-4.
- Pfeffer, F. T. (2015). Equality and Quality in Education a Comparative Study of 19 Countries. *Social Science Research*, 51(1), 350–368. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2014.09.004>
- Pramudyo, A. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dosen Negeri Pada Kopertis Wilayah V Yogyakarta. *Jurnal Bisnis : Teori Dan Implementasi*, 1(1), 1–11. Retrieved from <http://journal.umy.ac.id/index.php/bti/article/view/2407>
- Pretorius, L., & Macaulay, L. (2019). Wellbeing in Doctoral Education. In *Wellbeing in Doctoral Education*. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-9302-0>
- Primayana, Kadek Hengki, *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi*, Jurnal Penjamin Mutu 1 (2), 2015, <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM/article/view/45/54>.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Renaningtyas, Esty, *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMPN 1 Madiun*, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan 1 (1), 2013, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jmkpp/article/view/1503/1604>.
- Risianti, D. H., Danim, S., Winarto, H., & Dharmayana, I. W. (2019). The Development Of Group Counselling Assessment Instruments. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(10), 267–272. Retrieved from <http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-1019-23814>

- Rusandi, M. A., Sugiharto, D. Y. P., & Sunawan, S. (2019). Effectiveness of solution-focused group counseling to improve planned happenstance skills of student. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 7(1), 30. <https://doi.org/10.29210/127600>
- Sadler, D. R. (2017). Academic achievement standards and quality assurance. *Quality in Higher Education*, 23(2), 81–99. <https://doi.org/10.1080/13538322.2017.1356614>
- Salto, D. J. (2018). Quality assurance through accreditation: When resistance meets over-compliance. *Higher Education Quarterly*, 72(2), 78–89. <https://doi.org/10.1111/hequ.12151>
- Syafaruddin. *et.al*, *Peningkatan Kontribusi Manajemen Pendidikan dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas untuk Membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Medan: Perdana Publishing, 2015
- Taufan, Johandri dan Fachri Mazhud, *Kebijakan-kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi, 2014*, *Jurnal penelitian pendidikan* 14 (1). <https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/3213/2228>
- Torabi, M., Draahansky, M., Paridah, M. ., Moradbak, A., Mohamed, A. ., Owolabi, F. abdulwahab taiwo, ... Abdul Khalid, S. H. . (2016). Pedagogy of the Twenty-First Century: Innovative Teaching Methods. *Intech, i(tourism)*, 13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5772/57353>
- Trisnawati, *et.al*, *Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SD Negeri Lamteubee Aceh Besar, 2019*, *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan* 7 (1): 62-69. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/download/13184/10073>.
- Uotila, T., Harmaakorpi, V., & Hermans, R. (2013). Finnish Mosaic of Regional Innovation System Assesment of Thematical Regional Inovation Platforms Based on Related Variety. *European Planning Studies*, 20(10), 1583–1602.
- Widodo, H. (2016). Potret Pendidikan di Indonesia dan Kesiapannya dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). *Cendekia: Journal of Education and Society*, 13(2), 293. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v13i2.250>
- Winarsih, Sri, *Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, *Cendekia* 15 (1), 2017, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/cendekia/article/view/1005/726>.

ZA, Tabrani, *Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan Keagamaan Islam (Tantangan Terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah)*, Serambi Tarbawi 1 (2), 2013, <http://www.ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/1213/985>.